PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI (STUDI KASUS PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN PESISIR DI KOTA TANJUNGPINANG)

[1]Neng Suryanti Nengsih, [2]Dewi Kurniasih
[1] Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Raja Haji Tanjungpinang
[2] Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung
Email: [1]Suryatra@yahoo.com, [2]dekur010575@yahoo.com

ABSTRAK

Kawasan pesisir Kota Tanjungpinang berbeda dengan kondisi kawasan pesisir di wilayah lain. Wilayah ini merupakan kota tepi pantai yang mempunyai beberapa pulau kecil di kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura. Wilayah ini berfungsi sebagai pintu gerbang utama penghubung antara Kota Tanjungpinang dengan pulau penyengat yang dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran. Ekosistem wilayah ini sedang mengalami ancaman akibat pencemaran sampah yang bertebaran di laut. Sampah yang mengapung di kawasan pesisir ini menyebabkan permasalahan dalam batas air pantai sehingga memerlukan pengawasan pengelolaan sampah yang maksimal. Pengawasan sangat penting, mengingat perannya sebagai salah satu area perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi termasuk di tingkat pemerintah daerah. Inilah pentingnya penelitian ini dilakukan. Teori yang digunakan adalah *three basic type of controlling* yang dikemukakan Donnelly et all. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang belum optimal dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggarannya. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pengawasan terkait realisasi retribusi bidang persampahan, penggangkutan dan pengumpulan serta pembuangan sampah. Tidak adanya penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan juga yang menjadi acuan Kota Tanjungpinang turut menambah persoalan dalam pengawasan pengelolaan sampah kawasan pesisir.

Keyword: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Sampah, Kawasan Pesisir.

1. PENDAHULUAN

Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang memiliki ciri sebagai kawasan pesisir. Sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk setempat sebagai tempat permukiman dan kegiatan perekonomian. Perkembangan Kota Tanjungpinang memperlihatkan kecenderungan kembali ke pantai. Sebagai kota pantai maka dalam sistem tata ruang, kegiatan pembangunan tentunya terpusat di pantai.

Kawasan pesisir Kota Tanjungpinang berbeda dengan kondisi kawasan pesisir yang ada di wilayah lainnya, karakteristik wilayah pesisir kota Tanjungpinang merupakan kota tepi pantai yang mempunyai beberapa pulau kecil di kawasan terdapat Pelabuhan Sri Bintan Pura yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama penghubung kota Tanjungpinang dengan pulau penyengat yang dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran.

Mayoritas masyarakat di sepanjang pantai Kota Tanjungpinang melaksanakan aktivitas di bidang perekonomian khususnya disektor perdagangan. Aktivitas dilaksanakan pada pagi hari, sore dan malam hari. Selain aktivitas perekonomian, kawasan pantai Kota Tanjungpinang juga dimanfaatkan sebagai sarana pelabuhan domestik dan pelabuhan internasional serta sebagai sarana pelabuhan bongkar muat barang. Kawasan pantai Kota Tanjungpinang juga menjadi pasar induk/pasar rakyat.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam upaya pembenahan birokrasi menuju terciptanya *good governance*. Upaya menciptakan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien tidak hanya dilihat dari aspek organisasi, SDM, prosedur dan peraturan, melainkan juga pembenahan dari aspek pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengawasan menjadi sangat penting guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang ada, dan apabila terjadi perbedaan, maka disebut temuan. Dengan demikian fungsi pengawasan harus memberikan masukan penyempurnaan dan tindakan koreksi. Paradigma pengawasan menempatkan peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi.

Belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pesisir dilihat dari aspek pengawasan pendahuluan yang meliputi sumber sumber seperti sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sangat minim dalam hal ini sumber daya manusia pengawas yang dimiliki hanya berjumlah 5 orang itupun bukan merupakan pengawas tetap yang diangkat dari pegawai negeri sipil atau dari kalangan instansi bersangkutan, disamping itu sumber anggaran juga masih dirasakan sangat minim baik dari alokasi APBD maupun dari penarikan retribusi yang belum maksimal hal tersebut berdampak kepada belum optimalnya pengawasan pendahuluan maupun pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Pengawasan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah belum optimal, hal tersebut didasarkan pada data dari TPA Ganet Tanjungpinang dari tahun ke tahun jumlah sampah yang masuk semakin meningkat. Data menjelaskan bahwa pada tahun 2009 volume sampah yang masuk ke TPA Ganet Tanjungpinang berjumlah 301,30 M^3, pada tahun 2010 meningkat 309.63 M^3, dan pada tahun 2011 meningkat hingga 342,64 M^3. Data tersebut diatas jelas bahwasannya pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang harus diawasi secara optimal.

Meningkatnya volume timbulan sampah dikawasan Kota Tanjungpinang tentu memerlukan pengawasan pemerintah yang optimal dalam pengelolaannya dengan memaksimalkan pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung dan pengawasan umpan balik. Pengawasan pemerintah yang lemah pada saat pengawasan pendahuluan menyebabkan pengelolaan sampah kawasan pesisir belum optimal, dalam kurun waktu yang panjang hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat menganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan kawasan pesisir.

Aktivitas pengawasan oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang pada saat pekerjaan berlangsung dalam pengelolaan sampah hanya terlihat pada saat akan diadakannya kegiatan lingkungan hidup yang bersifat nasional. Pemerintah Kota melakukan manipulasi-manipulasi, seperti menyebarkan tempat sampah hanya untuk penilaian, membersihkan drainase, pasar, terminal hanya menjelang penilaian, serta mengerahkan masa menjelang dan saat penilaian, namun tidak ada tindak lanjut setelah penilaian selesai dan mendapat piala Adipura. Jadi pengawasan pemerintah terkesan berjalan dengan baik apabila ada kegiatan yang bersifat nasional saja namun eksistensi pengawasan tersebut tidak dilaksanakan lagi secara berkelanjutan dan terus menerus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: "… *the modern concept of control … provides a historical record of what has happened … and provides date the enable the … executive … to take corrective steps …*". Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi

juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengawasan merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diinginkan. Stoner dan Freeman (1996:556) "*controlling is the process of assuring that actual activities conform to planed activities"*. Secara umum dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin kegiatan cocok atau sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Koontz & O'Donnell (1984:578) "*controlling is the measurement and correction of performance in order to make sure that enterprisen objectives and the plants devised to attain them are being accomplished".*

Pendapat Koontz & O'Donnell di atas menjelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mengukur dan melakukan tindakan secara objektif atas kinerja aparat guna meyakinkan bagi kantor dan merencanakan suatu cara untuk mencapai keunggulan yang dimiliki oleh kantor tersebut.

Dalam konteks pemerintah Indonesia maka pengawasan juga dapat memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan menjamin terciptanya pemerintah dan kepemerintahan yang baik atau *good government*. Donnelly, et al. (dalam Zuhad, 1996:302) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe dasar, yaitu *preliminary control*, *concurrent control* dan *feedback control*. Ketiga hal tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Tipe Pengawasan



Sumber: Donnelly, et. al. (dalam Zuhad, 1996:302)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) sebagai pengawasan yang terjadi sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Pengawasan pendahuluan diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada saat pekerjaan akan dilakukan dan diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pada saat pengawasan pendahuluan dilakukan, lebih memusatkan perhatian pada masalah

mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan.

Pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung (*concurrent control*). Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung terutama terdiri dari tindakan-tindakan atasan yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

Pengawasan *feedback* (*feedback control*) yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

Reformasi Birokrasi

Reformasi menurut Djaja Saefullah (dalam Mariana, 2010:11) perubahan sistem secara luas atau perubahan struktural secara khusus. Birokrasi adalah sarana pokok untuk pelaksanaan administrasi, merupakan perwujudan salah satu unsur fungsional administrasi (Setyodarmodjo, 2005).

Reformasi birokrasi mengandung maksud agar birokrasi pemerintah selalu berlangsung baik, sesuai dengan kebaikan prinsip-prinsip manajemen modern yang semakin baik dalam melayani masyarakat yang memang merupakan subjek utama untuk dilayani oleh birokrat professional karir (PNS) yang merupakan subjek kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan (*outward looking)*. Reformasi birokrasi menurut Yusuf (2008: 113) dilakukan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi sesuai dengan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, dan sesuai dengan harapan strategis (*strategic objective*) yang ingin dicapai. Mustafa (2013:143) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Adapun faktor yang mendorong timbulnya reformasi birokrasi dalam pemerintahan menurut Thoha (2011: 106-107) adalah:

1. adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan
2. memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis nasional
3. memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis global
4. memahami perubahan yang terjadi dalam paradigm manajemen pemerintahan.

Pengelolaan Sampah

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Sudjana (2003:1) didefinisikan sebagai berikut: "*management as working together with or through people, individual or groups, to accomplish organizational goal*". Menurut pendapat lain, pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien (Arikunto, 1986:8).

Suprihatin (1999:18) menyatakan bahwa sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah yang sudah tidak memiliki manfaat dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan sampah dapat diantisipasi melalui pengelolaan sampah yang baik.

Pengelolaan sampah menurut (Yones, 2007:35) adalah:

> Pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan pertimbangan lingkungan lainnya serta tanggap terhadap perilaku massa.

Sistem pengelolaan sampah terdiri dari lima aspek yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Kawasan Pesisir

Kay dan Alder (1999:2) menjelaskan mengenai: *The band of dry land adjancent ocean space (water dan submerged land) in wich terrestrial processes and land uses directly affect oceanic processes and uses, and vice versa*. Sedangkan menurut Sorensen dan Mc. Creary dalam Clark (1996: 1) wilayah pesisir adalah *The part of the land affected by it's proximity to the land…any area in which processes depending on the interaction between land and sea are most intense.*

Dahuri (2003 : 9) menjelaskan bahwa wilayah pesisir menurut kesepakatan terakhir internasional adalah merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua *(continental shelf)*. Wilayah pesisir disini sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang terkena air laut.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode tersebut karena fokus penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana proses pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini relevan dengan mengungkapkan suatu proses menggunakan pendekatan kualitatif.

Permasalahan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir Kota Tanjungpinang tidak bisa dilihat secara parsial dan dipecah dalam beberapa variabel melainkan harus dilihat dalam satu kesatuan objek secara utuh (holistic) karena setiap aspek yang ada didalamnya memilik satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu metode penelitian yang tepat diterapkan adalah metode penelitian kualitatif.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Dalam hal ini peneliti menentukan anggota informan berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Studi Pustaka. Kajian pustaka ini dilakukan untuk mencari data sekunder sejak langkah awal penelitian.
2) Studi Lapangan. Dalam hal ini peneliti mengamati dan terjun langsung ke lapangan. Studi lapangan ini terdiri dari:
   (1) Observasi,
   (2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*).
   (3) Dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan nasional termasuk di daerah. Menanggapi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir.

Pengawasan dalam pengelolaan sampah dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan pengelolaan sampah telah dilaksanakan sesuai rencana atau tidak. Melalui pengawasan akan diperoleh informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan program atau kegiatan di tingkat lapangan. Dengan diketahuinya hasil pelaksanaan kebijakan melalui pengawasan, maka akan mempermudah pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan persampahan termasuk sampah kawasan pesisir. Hal tersebut sebagai upaya dalam rangka mewujudkan arah kebijakan reformasi birokrasi tersebut.

Wilayah pesisir terutama di Kota Tanjungpinang seringkali menjadi tercemar sebagai akibat dari aktifitas manusia. Hal tersebut dapat berakibat pada kelestarian alam laut. Pencegahan dari pencemaran tersebut memerlukan pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme pengawasan yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah.

Pencapaian penyelenggaraan reformasi birokrasi ditentukan oleh kemampuan dari aparatur yang terlibat didalamnya. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan manusia dalam hal ini aparatur adalah unsur penggerak dan pelaksana dari lembaga birokrasi itu sendiri. Proses birokrasi dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga seperti Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, aparaturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang ditanganinya.

Setiap aspek dalam pengawasan terhadapt aparatur ini, memerlukan suatu tolok ukur atau penetapan standar minimal. Hal tersebut memungkinkan ketercapaian sasaran-sasaran pada tiap aspeknya sehingga dapat terkendali dengan baik. Ketentuan standar

minimal tersebut antara lain meliputi jumlah personil yang harus ada dalam organisasi yang bersangkutan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Kualitas kemampuan tenaga kerja yang harus mengisi berbagai bagian dalam organisasi dengan segala jenis latar belakang pendidikannya. Sasaran apa saja pada tiap bagian yang ingin dicapai dan keterkaitan antara bagian-bagian tersebut sehingga dalam mencapai sasaran organisasi dapat dilakukan secara sistematis. Serta, pola karier dari para karyawan dalam organisasi yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja, dan sebagainya.

Sumber Daya Aparatur Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang yang menangani kebersihan, memiliki pengawas harian lepas dibidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berjumlah 13 orang, petugas TPS 18 orang petugas pengawas 5 orang dan petugas kebersihan pantai 8 orang. Dengan jumlah pengawas petugas kebersihan yang hanya berjumlah 5 orang dirasakan sangat sulit untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan sampah kawasan pesisir mengingat tugas pengawas tersebut tidak hanya mengawasi pengelolaan sampah pesisir saja melainkan juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang ada di daratan. Sementara itu, personil yang berjumlah 5 orang tersebut hanya berstatus sebagai tenaga harian lepas atau pegawai tidak tetap.

Belum maksimalnya jumlah SDM ini menjadi salah satu kendala belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu kemampuan SDM pengawas harian lepas merupakan suatu keharusan. Keterbatasan SDM pengawas harian lepas tersebut disamping mereka mempunyai profesi ganda (satu sisi sebagai pengawas harian lepas namun satu sisi juga berprofesi sebagai tukang ojek) sehingga pekerjaan yang mereka lakoni dibidang pengawasan tersebut hanya sebatas gugur tanggung jawab saja. Disamping itu kebiasaan dari sistem kepegawaian pada pegawai negeri yang sering pindah tugas juga terjadi. Pegawai negeri yang sudah mendapat pelatihan lingkungan tertentu, ditempatkan di bidang luar lingkungan hidup. Kenyataan ini terjadi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman karena kemampuan mengatasi persoalan lingkungan hidup tidak dapat diberikan oleh kebanyakan orang. Mereka harus sudah terlatih pada bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan sarana pengangkutan yang memadai akan berpengaruh terhadap teknis operasional pengelolaan sampah secara umum. Volume sampah Kota Tanjungpinang sebesar 300 m^3/hari dengan asumsi densitas sampah 200 kg/m3, Berat

sampah rata-rata yang diangkut oleh armada pengangkutan (dump truck/arm roll truck) sebanyak 1.600 kg/dump truck/rit. Selanjutnya jika diabaikan pemanfaatan sampah oleh pemulung, maka kebutuhan alat angkut berkapasitas 8 m3 seperti dump truck sebanyak 11 unit dump truck dengan rotasi 2 kali sehari ditambah 4 unit arm roll truck ritasi 4 kali sehari. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dan ketersediaan armada pengangkutan saat ini, maka jumlahnya belum mencukupi untuk pengangkutan sampah dan layaknya bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk dan volume sampah yang ditimbulkan.

Pelayanan pengangkutan sampah sebagai bagian dari pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang masih kurang memadai. Oleh karena itu, Sub unit Dinas Pertamanan dan Kebersihan selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada.

Pembiayaan dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang, termasuk di dalamnya dari penerimaan retribusi kebersihan. Adapun total keseluruhan APBD kota Tanjungpinang tahun 2010 berjumlah Rp 236.794.524.635 terbagi kedalam sektor APBD sektor lingkungan Rp 9.625.204.090, Lembaga Pengelola LH Rp 1.6363904.090. Sementara itu dari hasil penerimaan retribusi berdasarkan data tahun 2010 ditargetkan berjumlah Rp 250.000.000 namun realisasi yang tercapai hanya Rp 143.692.937 atau sekitar 57,48% dari yang ditargetkan. Data menunjukkan retribusi yang dipunggut berkenaan dengan pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal.

Retribusi merupakan iuran untuk keperluan pengumpulan dan pemindahan dari sumber sampah ke TPS. Besarnya retribusi pengumpulan dan pengangkutan tersebut sebesar Rp. 5.000,00 dan besarnya retribusi ini berbeda-beda bagi setiap rumah tangga bergantung pada besar kecilnya sampah yang dihasilkan. Pembayaran retribusi tidak disamakan setiap rumahnya. Sebagai hasil musyawarah dari anggota warga perlu dilakukan subsidi silang, hal ini ditunjukkan jawaban informan secara aklamasi menghendaki hal seperti ini. Dengan adanya subsidi silang ini dapat saling mengisi dan saling bergotong royong dan saling berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan terutama masalah sampah di pantai atau pesisir dimana mereka berdomisili sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Penarikan retribusi kebersihan dilakukan oleh petugas Dispenda Kota Tanjungpinang sebagai pemasukan dibidang kebersihan dengan sistem *door to door* ke masing-masing pertokoan dan daerah komersil sesuai dengan Perda Tanjungpinang No 3 Tahun 2004. Seluruh hasil retribusi ini menjadi sumber pemasukan bagi Pemerintah Daerah, kemudian Pemda akan membagi seluruh pendapatan daerah kepada dinas-dinas yang memerlukan, termasuk Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

Pemerintah Kota Tanjungpinang paling tidak setahun akan mengeluarkan dana Rp. 10 Milyaran sementara PAD yang dihasilkan dari retribusi sampah hanya sekitar Rp. 500-600 juta. Belum lagi masalah beban jumlah sampah yang tidak sebanding dengan armada dan sumber daya manusia yang ada dimana pertambahan penduduk setiap tahun mengingat Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi. Untuk itu, diusulkan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat bekerjasama dengan pihak ke 3 yang telah berpengalaman mengelola sampah dengan professional.

Dengan dikelolanya sampah oleh pihak ke 3 berarti ada penghematan APBD karena semua aseet dan prasarana di TPA diinvestasikan oleh pihak ke-3. Selain itu pengelolaan sampah oleh pihak ke 3 semakin besar lagi penghematan APBD sehingga dana bisa diserap untuk kegiatan lain. Adanya kemitraan mengenai dana oleh pihak ke3 tentu memerlukan pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran perjanjian kerjasama. Donnelly menyatakan bahwa sumber-sumber daya anggaran harus pula tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Kebijakan pengawasan penyelengaraan Pemerintah daerah itu sendiri bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*), menanggulangi masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan negara, pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

Pengawas telah memberikan pengarahan tetapi tidak cukup memaksa. Kendaraan kebersihan pada saat beroperasi dan dilain kesempatan ada beberapa supir dan ABK yang mengangkut sampah sesuai dengan muatannya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya supir dan ABK hanya sekedar beroperasi menurut rutenya dan kembali ke TPA tanpa mengangkut sampah yang sesuai dengan kapasitas bak.

Penyebab tidak maksimalnya pengawasan pada saat pekerjaan sedang berlangsung bahwa informasi tentang pengangkutan sampah dari pengawas kepada supir kendaraan kebersihan agar sesuai dengan peraturan tidak dijalankan dengan baik oleh supir dan ABK. Artinya pengawasan tidak berjalan secara efektif. Adapun yang menyebabkan tidak berjalannya pengawasan tersebut disebabkan oleh kondisi alam/ cuaca yang tidak memadai untuk melakukan pengangkutan sampah. Apabila dalam melakukan pengangkutan sampah terdapat suatu keadaan yang memaksa sehingga tidak memadai untuk melakukan pengangkutan sampah maka pengawas dapat bertindak fleksibel dengan cara memberikan keringanan-keringanan kepada supir dan ABK.

Pengelolaan Sampah dan pengawasan sampah di Kota Tanjungpinang pada saat ini masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan pemakaman Kota Tanjungpinang. Pengawasan *feed beck* yang dimaksudkan disini adalah pengawasan pada hasil akhir yang meliputi keberhasilan dan kendala atau kekurangan terhadap sumber sumber yang ada. Berdasarkan data tugas pokok dan fungsi dinas kebersihan, pertamanan dan pemakaman kota Tanjungpinang yang memiliki tugas pokok melaksanakan program perumusan kebijaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan, persampahan dan drainase untuk menciptakan kebersihan kota dan penyiapan bahan kegiatan dan pekerjaan pengelolaan kebersihan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh kepala kantor.

Pada tahap pengawasan ini, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas kebersihan, pemakaman dan pertamanan kota Tanjungpinang adalah memahami konsep pengelolaan dan penanganan sampah pesisir menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketiga aspek ini bersinggungan satu dengan yang lainnya dan bersifat saling melengkapi demi tercapai suatu sistem yang terintegrasi.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Pengawasan pemerintah daerah dalam mewujudkan arah reformasi birokrasi melalui pengelolaan sampah kawasan pesisir di Kota Tanjungpinang dikelompokkan kedalam tiga tipe yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung dan pengawasan umpan balik.

1. Pengawasan pendahuluan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang masih terdapat kendala-kendala dari segi aparatur terutama adanya keterbatasan pengawas lapangan dalam pengelolaan sampah. Selain itu terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta penganggaran yang disebabkan belum maksimalnya realisasi retribusi dibidang persampahan, pengangkutan dan pengumpulan sampah.
2. Pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir Kota Tanjungpinang pada saat pekerjaan berlangsung belum mengedepankan penetapan norma, standar dan prosedur serta kriteria pengawasan yang menjadi acuan pemerintah daerah. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.
3. Pada tahap pengawasan umpan balik menunjukkan masih ditemukannya timbulan sampah di kawasan pesisir yang disebabkan tidak berjalannya pengawasan pendahuluan dan pengawasan ketika pekerjaan berlangsung.

Saran

1. Perlu penambahan jumlah tenaga pengawas dan penataan sumber daya aparatur pengelolaan sampah di kawasan pesisir sesuai dengan luas wilayahnya.
2. Perlu peningkatan efektivitas dan optimalisasi pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir.
3. Tingkatkan jumlah anggaran untuk pengawasan pengelolaan sampah di kawasan pesisir dengan peningkatan efektivitas, efisiensi dan prioritas alokasi belanja daerah.
4. Intensifkan pengawasan pemungutan retribusi sampah di di kawasan pesisir.
5. Tingkatkan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana angkutan pengelolaan sampah di kawasan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 1996 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta : Rineka Cipta.

Clark.J.R.,1996. *Costal zone Management Hand Book*. New York USA: Lewis Publisher.

Dahuri, Rokhmin, 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

H. Donnelly James, 1996. *Manajemen Jilid 1 edisi 9*, alih bahasa Zuhad Ichyaudin,Bandung : penerbit Erlangga.

Kay, R. and Alder, J. 1999. *Coastal Management and Planning*. New York: E & FN SPON.

Koontz, harold and Cyril O'Donnell and Heinz Weihrich. 2006 *Management*, Kogakusha : Mc Graw-Hill,Inc.

Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Stoner, James A.F.R Edward Freeman & Daniel R. Gilbert Jr. 1996. *Manajemen Jilid I*, alih bahasa Alexander Sindoro, Jakarta: PT. Prehallindo.

Setyodarmodjo, Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.

Supriharyono. 2007. *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta: Kencana.

Winardi, 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.